

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era pembangunan global saat ini, inklusi keuangan menjadi salah satu perkembangan terkini dalam upaya pengentasan kemiskinan, ketimpangan pendapatan yang tidak merata di seluruh dunia (Febriaty *et al.*, 2020). Artinya, inklusi keuangan yang merupakan lembaga keuangan berperan dalam fungsi intermediasi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengentasan kemiskinan, stabilitas sistem keuangan yang memadai, serta distribusi pendapatan yang optimal sehingga tercapainya masyarakat yang sejahtera.

Pertumbuhan ekonomi yang meningkat, menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik, tetapi pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi yang cenderung meningkat belum mencapai pertumbuhan yang berkualitas, dimana pertumbuhan ekonomi Indonesia belum dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yaitu dengan memperhitungkan pemerataan pendapatan serta pengentasan kemiskinan, sehingga terciptanya kesejahteraan masyarakat yang memadai. Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata berdampak pada kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Peran kebijakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan berfokus pada kebijakan fiskal baik melalui instrumen retribusi, salah satunya yaitu pajak yang sebagian besar

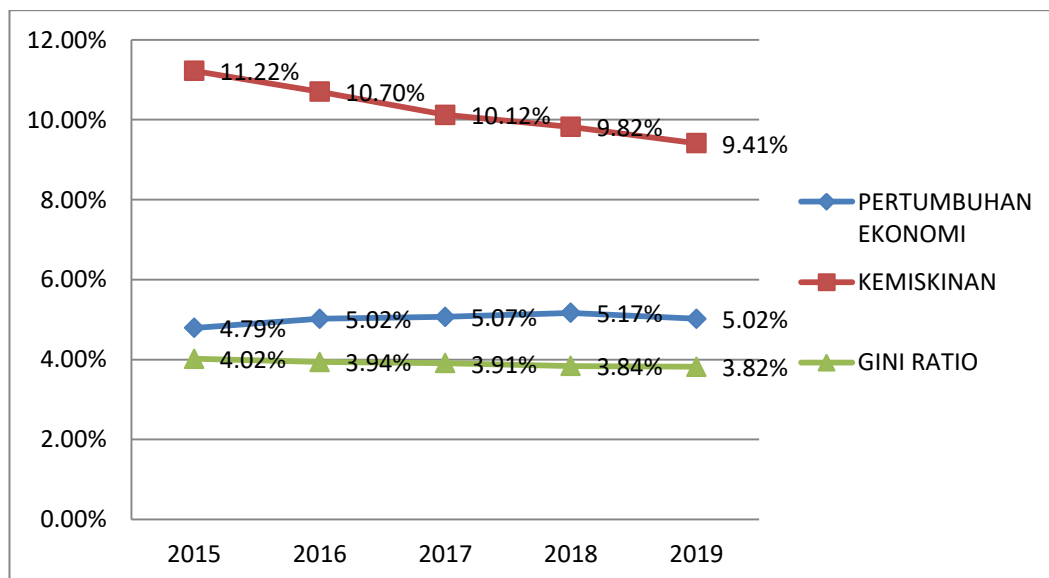
mempengaruhi kebijakan distribusi pendapatan saat ini. Kebijakan fiskal tersebut merupakan kebijakan pemerintah guna untuk mensejahterakan rakyatnya. Adapun selain kebijakan fiskal ini, ada kebijakan dalam bidang keuangan yaitu kebijakan moneter, yang meningkatkan minatnya dalam pembangunan dan berdampak pada kemiskinan dan juga ketimpangan pendapatan. Walaupun perekonomian terus menguat, terdapat beberapa kendala pada masyarakat miskin, yaitu pendapatan yang rendah yang hanya mampu memenuhi kebutuhan primer dan tidak memiliki tabungan. Permasalahan tersebut menyebabkan kurangnya akses instrumen keuangan terutama perbankan.

Inklusi keuangan saat ini menjadi fokus utama dalam pembangunan sektor keuangan diberbagai negara termasuk Indonesia. Dengan sistem keuangan yang inklusif, masyarakat dapat mengakses jasa keuangan dengan mudah serta efisien, dan untuk mengukur tingkat inklusi keuangan suatu wilayah diperlukan alat ukur. Sarma (2012) mengembangkan alat ukur untuk mengukur tingkat inklusi keuangan suatu wilayah dengan merumuskan indeks inklusif keuangan (Ningrum, 2018). Indeks Inklusi Keuangan mampu memberikan gambaran akan tingkat inklusivitas keuangan pada suatu perekonomian secara lebih komprehensif dibandingkan berbagai ukuran lainnya. Indeks tersebut dibangun dari tiga dimensi, yaitu dimensi penetrasi jasa perbankan, dimensi ketersediaan jasa perbankan, dan dimensi penggunaan jasa perbankan (Muslikhah & Utami, 2020). ukuran indeks inklusi keuangan dapat menjelaskan bahwa semakin banyak inklusi keuangan suatu daerah menunjukkan ukuran dimana inklusi keuangan nasional berada dalam pengurangan dan pemerataan.

Pengukuran indeks inklusi keuangan dapat menjelaskan bahwa semakin tingginya indeks inklusi keuangan suatu wilayah menunjukkan sejauh mana

strategi nasional keuangan inklusif dalam pengentasan kemiskinan, pemerataan pendapatan serta pertumbuhan ekonomi yang optimal. Keberhasilan implementasi inklusi keuangan dapat dicapai jika penduduk seluruh wilayah Indonesia memiliki akses keuangan yang mudah dan merata.

Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, dunia perbankan sangat berperan untuk menjadi penggerak kegiatan keuangan inklusif. Dengan demikian keterlibatan dalam keuangan inklusif tidak hanya terkait dengan tugas Bank Indonesia, namun juga pemerintah dalam upaya pembangunan nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, serta stabilitas sistem keuangan. Melalui strategi nasional keuangan inklusif, diharapkan adanya kolaborasi antar lembaga pemerintahan dengan pemangku kebijakan, agar kepentingan umum tercipta dengan baik, efisien dan terstruktur.



Sumber : BPS, 2020 diolah

Gambar 1.1 : Perkembangan pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan di Indonesia tahun 2015-2019

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia terbilang cukup baik. Dalam lima tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup meningkat, tetapi pada tahun 2019 mengalami penurunan, dimana tahun 2015 tumbuh sebesar 4,79%, tahun selanjutnya tumbuh sebesar 5,02%, dan di tahun 2018 tumbuh sebesar 5,17% sedangkan pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan menjadi sebesar 5,02%.

Pada tahap awal pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang meningkat akan diiringi dengan masalah-masalah ekonomi diantaranya adalah pengangguran, kemiskinan, serta ketimpangan pendapatan. Kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia terbilang cukup tinggi dimana pada tahun 2019 *gini ratio* di Indonesia sebesar 3.82% dan kemiskinan di Indonesia sebesar 9.41%. Pada gambar tersebut menunjukkan perekonomian cenderung menguat serta terdapat kendala pada masyarakat yang berpendapatan rendah.

Muslikhah & Utami (2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Inklusi keuangan memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Variabel ekonomi makro yang memiliki pengaruh yang signifikan yaitu inflasi berpengaruh positif sedangkan UMP riil berpengaruh negatif, dan variabel pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan.

Febriaty *et al* (2020) dalam penelitiannya bahwa, secara parsial pengaruh inklusi keuangan seperti jumlah rekening kredit, jumlah rekening tabungan (DPK) dan jumlah kredit UMKM tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan jumlah mesin ATM memiliki pengaruh yang signifikan

terhadap pertumbuhan ekonomi. berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan jumlah tabungan JTAB berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. pertumbuhan ekonomi sedangkan secara simultan (bersama-sama) variabel JATM, JKB, JRK, JTAB dan UMKM mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Arya (2020) dalam penelitiannya menghasilkan Inklusi keuangan belum mampu secara efektif menekan hambatan yang memperlambat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produksi masyarakat, sehingga kenaikan tingkat inklusi keuangan belum efektif meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Adriani & Wiksuana (2018) dalam penelitiannya menghasilkan bahwa inklusi keuangan mampu memicu pertumbuhan UMKM baru dan peningkatan pertumbuhan ekonomi serta Inklusi keuangan dalam jangka pendek belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam menekan angka kemiskinan.

Ningrum (2018) dalam penelitiannya menghasilkan bahwa provinsi Jawa Timur dapat dikatakan tingkat inklusi keuangannya tergolong baik. Pada nilai indeks inklusi keuangan di 38 kabupaten/ kota mempunyai nilai rata-rata sebesar 0,8. Nilai tersebut berada diantara 0 dan mendekati nilai 1 yang artinya sistem keuangannya semakin inklusif.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya, dimana penelitian ini menggunakan teknik analisis data VAR yang bertujuan untuk menganalisis hubungan kausalitanya atau hubungan sebab akibat antar variabel, sehingga peneliti mengambil judul **“Hubungan**

Kausalitas Antara Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan dengan Inklusi Keuangan di Indonesia”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat di rumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut

1. Apakah terdapat hubungan kausalitas kemiskinan dengan inklusi keuangan di Indonesia?
2. Apakah terdapat hubungan kausalitas pertumbuhan ekonomi dengan inklusi keuangan di Indonesia?
3. Apakah terdapat hubungan kausalitas ketimpangan pendapatan dengan inklusi keuangan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan kausalitas antara variabel kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan dengan inklusi keuangan di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan bukti empiris, serta dapat dijadikan alternatif riset mengenai hubungan kausalitas kemiskinan dengan inklusi keuangan di Indonesia dalam mencapai sasaran akhir. Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat mendukung penelitian-penelitian mengenai berbagai permasalahan ekonomi lainnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan informasi bagi masyarakat umum dan bank sentral. Bagi masyarakat umum yaitu sebagai bentuk edukasi mengenai berbagai permasalahan ekonomi di Indonesia dan bagi Bank Sentral sebagai uji empiris tentang pelaksanaan kebijakan yang sudah dilakukan.